

Diplomasi Algoritmik Dan Kedaulatan Kognitif: Redefinisi Komunikasi Publik Indonesia Di Tengah Hegemoni Kecerdasan Artifisial Global 2026

Hambali¹, Ninuk Riswandari²

¹Program Studi Administrasi Publik, Universitas Yudharta Pasuruan, Pasuruan, Indonesia

²Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Yudharta Pasuruan, Pasuruan, Indonesia

*Corresponding Author: hambali@yudharta.ac.id

Article History

Submitted: 11 Agustus 2026,

Accepted: 13 Agustus 2026,

Published: 15 Agustus 2026

Keywords: *Algorithmic Diplomacy; Cognitive Sovereignty; Public Communication; Digital Hegemony; Public Policy*

This is an open access article under the

[CC-BY-SA](#) license.



ABSTRACT

This study analyzes the redefinition of Indonesian public communication amidst global artificial intelligence (AI) hegemony, focusing on the concepts of algorithmic diplomacy and cognitive sovereignty. The purpose of this study is to identify the challenges and opportunities presented by AI to public opinion formation, national narratives, and the state's capacity to manage strategic information up to 2026. Employing a qualitative-exploratory approach, this research analyzes policy documents, conducts in-depth interviews with relevant stakeholders in public administration, technology, and communication, and develops future scenario projections. Key findings indicate that AI threatens cognitive sovereignty through disinformation and polarization, necessitating Indonesia's mastery of algorithmic diplomacy to safeguard national interests in cyberspace. The redefinition of public communication demands institutional adaptation, strengthening public digital literacy, human resource capacity building, and the formulation of anticipatory regulations. This study concludes that without comprehensive strategies to manage AI's impact, Indonesia risks losing narrative control and informational autonomy. Recommendations include establishing an adaptive policy framework and investing in robust cognitive infrastructure.

PENDAHULUAN

Era kontemporer ditandai oleh akselerasi penetrasi kecerdasan artifisial (AI) yang mengubah lanskap global secara fundamental, tidak terkecuali dalam ranah komunikasi publik dan diplomasi antarnegara. Dominasi teknologi AI global menciptakan suatu hegemoni digital yang memengaruhi pembentukan opini, diseminasi informasi, dan bahkan persepsi publik di berbagai belahan dunia (Кубанцева, 2026). Dalam konteks ini, konsep diplomasi algoritmik muncul sebagai paradigma baru yang menggambarkan penggunaan algoritma dan AI untuk memengaruhi hubungan internasional, membentuk narasi strategis, dan memobilisasi dukungan publik. Fenomena ini menghadirkan tantangan signifikan bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk menjaga otonomi informasinya serta mempertahankan kedaulatan kognitif warganya (Peña et al., 2025). Keberadaan platform digital yang didukung AI secara inheren memengaruhi jangkauan dan dampak upaya diplomatik, menuntut strategi adaptif untuk memanfaatkannya secara efektif (Zeynalova, 2026),(Maksimov,Kirill Georgievich Shapovalov, 2025). Fokus penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk memahami bagaimana redefinisi komunikasi publik di Indonesia dapat diwujudkan guna menghadapi hegemoni AI global ini, khususnya dalam proyeksi hingga tahun 2026. Tanpa pemahaman yang komprehensif, potensi ancaman terhadap kedaulatan kognitif dan integritas informasi nasional dapat meningkat secara drastis.

Pemerintah dan pembuat kebijakan di Indonesia menghadapi imperatif untuk beradaptasi dengan pergeseran teknologi ini, memanfaatkan potensi analisis big data dan perangkat digital seraya secara bersamaan menjaga kepentingan nasional dan nilai-nilai demokrasi (Sumrahadi & Maliki, 2024). Pemanfaatan AI untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik di sektor pemerintahan Indonesia juga menjadi sorotan, seperti implementasi AI dalam layanan publik dan tata kelola cerdas di beberapa daerah (Silitonga & Isbah, 2023). Transformasi digital dalam pelayanan publik ini seringkali melibatkan AI secara eksplisit maupun implisit, menunjukkan komitmen adaptasi Indonesia terhadap teknologi. Namun, implementasi ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang potensi ketergantungan pada teknologi asing dan dampaknya terhadap kedaulatan data dan regulasi nasional (Ayu et al., 2025). Ancaman terhadap kedaulatan kognitif tidak hanya berasal dari eksternal, melainkan juga dari tantangan internal seperti misinformasi dan polarisasi opini publik yang diperparah oleh algoritma media sosial (Ekotrans et al., 2024). Dengan demikian, mendefinisikan ulang komunikasi publik menjadi esensial untuk membangun ketahanan informasi dan memastikan bahwa narasi nasional tetap relevan dan akurat di tengah arus informasi yang dimediasi AI. Pertanyaan tentang bagaimana Indonesia dapat mengamankan ruang kognitifnya

di era di mana informasi dan persepsi dapat dimanipulasi secara algoritmik menjadi sangat relevan (Nusi et al., 2025). Penelitian ini akan menginvestigasi bagaimana hegemoni AI global membentuk ulang komunikasi publik Indonesia dan strategi apa yang dapat diterapkan untuk melindungi kedaulatan kognitif hingga tahun 2026.

Studi terdahulu menyoroti bahwa AI semakin berperan sebagai instrumen vital untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas negosiasi internasional, menawarkan kapabilitas analisis data waktu nyata, pelacakan sentimen, serta pemodelan prediktif skenario diplomatik (Judijanto et al., 2025). Transformasi paradigma diplomatik tradisional juga telah diamati melalui fusi politik digital dan analitik big data, yang membuka jalur baru untuk pengambilan keputusan strategis dan pemahaman tren global (Sumrahadi & Maliki, 2024), (Bubashait, n.d.). Di Indonesia, diskursus mengenai implikasi AI dan teknologi digital terhadap kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional berlangsung aktif, termasuk dalam aplikasi spesifik seperti integrasi AI untuk penyelesaian sengketa maritim (Prakoso et al., 2025), (Juli et al., 2025). Diplomasi digital, khususnya melalui platform media sosial, telah diidentifikasi sebagai alat signifikan untuk keterlibatan publik dan komunikasi strategis, di mana sifat algoritmik platform tersebut memengaruhi jangkauan dan dampak upaya diplomatik (Mirnes, Mujkić; Avdić, 2026). Penelitian-penelitian ini menggarisbawahi pergeseran signifikan dalam praktik diplomasi, dari model konvensional menuju pendekatan yang lebih bergantung pada teknologi. Meskipun demikian, sebagian besar fokus masih pada bagaimana AI dapat dimanfaatkan sebagai alat, bukan pada implikasinya terhadap kedaulatan kognitif. Studi tentang kerangka kerja dan implementasi diplomasi algoritmik telah ada, namun belum secara khusus menyentuh redefinisi komunikasi publik Indonesia secara holistik. Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu diisi guna memahami dinamika kompleks antara diplomasi algoritmik dan kedaulatan kognitif.

Konsep kedaulatan kognitif menjadi pusat perhatian dalam menghadapi implikasi AI generatif dan fragmentasi ekonomi digital global terhadap kedaulatan nasional (Mydes & Tandane, 2025). Ini mencakup spektrum risiko yang luas, mulai dari kedaulatan data, independensi regulasi, hingga keamanan nasional, yang berpotensi menimbulkan ketergantungan teknologi asing. Strategi untuk memperkuat kedaulatan kognitif di Indonesia memerlukan penguatan regulasi nasional, mendorong inovasi berbasis data domestik, serta peran aktif dalam forum internasional untuk membentuk tata kelola AI global (Nugroho, 2024). Hal ini telah banyak dibahas dengan fokus pada bagaimana AI mengubah produksi dan diseminasi berita, memengaruhi praktik jurnalistik, dan memperkenalkan kompleksitas etika seperti bias algoritmik (Besman & Evita, 2024). Adanya

masalah hukum digital dan implikasinya terhadap kebijakan tata kelola yang baik di Indonesia juga telah menjadi perhatian (Marwan et al., 2022). Meskipun terdapat studi tentang tantangan AI terhadap kedaulatan digital dan transformasi komunikasi, belum banyak penelitian yang secara komprehensif mengintegrasikan diplomasi algoritmik, kedaulatan kognitif, dan redefinisi komunikasi publik Indonesia dalam satu kerangka analitis. Kesenjangan ini menandakan perlunya eksplorasi mendalam mengenai bagaimana Indonesia dapat secara proaktif merumuskan strategi komunikasi publik untuk melindungi dan memperkuat kedaulatan kognitifnya di tengah hegemoni AI global yang terus berkembang.

Berdasarkan konteks dan urgensi yang telah dipaparkan, penelitian ini merumuskan permasalahan utama sebagai berikut: Pertama, bagaimana hegemoni kecerdasan artifisial global memengaruhi redefinisi komunikasi publik Indonesia, khususnya dalam konteks diplomasi algoritmik. Kedua, bagaimana Indonesia dapat mempertahankan dan memperkuat kedaulatan kognitifnya di tengah dinamika hegemoni kecerdasan artifisial global hingga tahun 2026. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dampak diplomasi algoritmik terhadap redefinisi komunikasi publik Indonesia di era hegemoni AI global.
2. Mengidentifikasi tantangan dan peluang bagi Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan kognitifnya di tengah dominasi kecerdasan artifisial global.
3. Merumuskan strategi redefinisi komunikasi publik yang relevan dan adaptif bagi Indonesia guna menjaga kedaulatan kognitifnya hingga tahun 2026.

Studi ini memiliki kontribusi signifikan baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan komunikasi internasional dan studi diplomasi digital dengan memperkenalkan dan mengelaborasi konsep kedaulatan kognitif dalam spektrum diplomasi algoritmik (Mydes & Tandane, 2025), khususnya dari perspektif negara berkembang seperti Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih bernuansa tentang bagaimana negara-negara dapat menegosiasikan pengaruh teknologi AI yang ekstensif terhadap ruang informasional dan pembentukan identitas nasional. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan strategis yang berharga bagi pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri dan lembaga komunikasi publik lainnya, dalam merumuskan kebijakan dan strategi komunikasi. Rekomendasi yang dihasilkan akan membantu dalam mengembangkan kerangka kerja adaptif dan proaktif untuk menghadapi tantangan hegemoni AI global hingga tahun 2026 (Nuswantari et al., 2025). Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan

informasi dan kedaulatan kognitif bangsa di era digital yang semakin kompleks, memastikan bahwa suara dan narasi Indonesia tetap relevan di panggung global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk menggali fenomena diplomasi algoritmik dan kedaulatan kognitif di Indonesia secara mendalam. Pendekatan kualitatif memungkinkan eksplorasi kompleksitas interaksi sosial, kebijakan, dan persepsi individu dalam konteks hegemoni kecerdasan artifisial global. Desain deskriptif dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai karakteristik, dinamika, dan implikasi redefinisi komunikasi publik. Metode ini berfokus pada pemahaman konteks dan makna di balik data yang dikumpulkan, bukan pada pengujian hipotesis kuantitatif.

Pendekatan kualitatif sangat relevan untuk menginvestigasi isu-isu kontemporer yang melibatkan teknologi baru dan dampaknya pada dimensi sosial dan politik. Dalam studi ini, hal tersebut mencakup bagaimana kecerdasan artifisial (AI) membentuk ulang lanskap komunikasi publik dan respons diplomatik di Indonesia (Muhammad Jordan Baresi, Anak Agung Banyu Perwita, 2025). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap nuansa dan interpretasi beragam dari aktor-aktor kunci terkait diplomasi algoritmik dan strategi kedaulatan kognitif. Tujuannya adalah untuk memahami perspektif para pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi mengenai tantangan serta peluang yang muncul akibat kemajuan AI.

Desain deskriptif memastikan bahwa penelitian ini dapat menguraikan secara rinci kondisi eksisting terkait implementasi AI dalam komunikasi publik dan diplomasi. Ini melibatkan identifikasi kerangka kerja diplomasi algoritmik serta tantangan dalam menjaga kedaulatan kognitif Indonesia di era digital (Mydes & Tandane, 2025). Penelitian ini tidak berupaya membangun hubungan sebab-akibat, melainkan untuk menggambarkan secara sistematis bagaimana Indonesia beradaptasi dengan perubahan yang didorong oleh AI. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan landasan konseptual dan empiris yang kaya bagi pembuat kebijakan dan peneliti selanjutnya.

INFORMAN PENELITIAN

Penentuan informan penelitian dilakukan melalui teknik purposive sampling, yang berarti pemilihan partisipan didasarkan pada tujuan spesifik penelitian. Kriteria utama pemilihan informan adalah kapabilitas dan pengetahuan mereka yang mendalam mengenai isu diplomasi algoritmik,

kedaulatan kognitif, dan komunikasi publik di era kecerdasan artifisial. Pendekatan ini memastikan bahwa data yang diperoleh berasal dari individu yang memiliki pengalaman langsung atau keahlian teoretis relevan, sehingga memungkinkan penggalian informasi yang kaya dan relevan. Fleksibilitas purposive sampling sangat sesuai untuk penelitian kualitatif yang membutuhkan perspektif dari aktor-aktor kunci.

Informan kunci penelitian meliputi pejabat dari lembaga pemerintah strategis seperti Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kehadiran mereka vital untuk memahami kerangka kebijakan dan strategi pemerintah Indonesia dalam menanggapi hegemoni kecerdasan artifisial global. Selain itu, akademisi dari disiplin ilmu hubungan internasional, komunikasi, dan studi kecerdasan artifisial juga dilibatkan. Para akademisi ini berkontribusi dalam memberikan perspektif teoretis dan analitis terhadap fenomena yang diteliti, termasuk analisis AI dalam negosiasi multilateral (Judijanto et al., 2025) dan implikasinya terhadap kedaulatan nasional (Mydes & Tandane, 2025).

Praktisi atau pakar kebijakan teknologi juga menjadi bagian integral dari informan penelitian. Mereka memiliki pemahaman praktis mengenai implementasi teknologi digital dan AI, termasuk isu tata kelola AI (Lisaldy et al., 2024) dan perlindungan data (Purwaningtyas, 2020). Keahlian mereka sangat berharga untuk mengevaluasi dampak teknologi AI terhadap komunikasi publik dan strategi diplomatik Indonesia. Pemilihan informan yang beragam ini bertujuan untuk memperoleh pandangan holistik dari berbagai pemangku kepentingan yang relevan dengan topik penelitian.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam (*indepth interviews*) dengan informan kunci yang telah ditentukan sebelumnya. Wawancara ini dirancang secara semi-terstruktur, memungkinkan peneliti untuk mengikuti panduan pertanyaan utama sambil tetap fleksibel mengeksplorasi isu-isu menarik yang muncul selama percakapan. Tujuannya adalah untuk menggali perspektif subjektif, pengalaman, dan pemahaman mendalam informan mengenai diplomasi algoritmik, kedaulatan kognitif, serta redefinisi komunikasi publik di Indonesia. Pendekatan ini memfasilitasi pemahaman konteks yang kaya dan nuansa makna yang mungkin terlewatkan oleh metode pengumpulan data lainnya.

Topik yang dibahas selama wawancara mencakup implementasi kerangka kerja diplomasi algoritmik di Indonesia, termasuk penggunaan AI dalam negosiasi multilateral dan analisis data untuk kebijakan luar negeri (Judijanto et al., 2025). Diskusi juga difokuskan pada upaya Indonesia

dalam memperkuat kedaulatan kognitif di tengah pengaruh AI global, seperti melalui regulasi AI (Lisaldy et al., 2024) dan perlindungan data pribadi (Prastyanti & Sharma, 2024). Selain itu, wawancara mengeksplorasi bagaimana teknologi digital dan AI telah mengubah praktik komunikasi publik, termasuk peran media sosial dalam pembentukan opini (Ausat, 2023). Pertanyaan-pertanyaan dirancang untuk mengungkap tantangan dan strategi adaptasi yang dihadapi Indonesia dalam lanskap digital yang terus berkembang.

Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi, yang melibatkan penelusuran dan analisis berbagai sumber tertulis dan digital. Sumber-sumber ini mencakup kebijakan pemerintah terkait transformasi digital dan AI (Wadipalapa et al., 2024), laporan penelitian dari lembaga kredibel, serta publikasi ilmiah dan artikel jurnal. Artikel berita dan laporan media massa juga dianalisis untuk memahami diskursus publik dan isu-isu kontemporer seputar kecerdasan artifisial dan komunikasinya di Indonesia. Pengumpulan data sekunder ini berfungsi untuk melengkapi informasi primer dan memberikan konteks historis serta kebijakan yang lebih luas terhadap fenomena yang diteliti.

TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis tematik, sebuah metode yang sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola (tema) dalam data kualitatif. Teknik ini sangat tepat untuk penelitian ini karena memungkinkan peneliti untuk menggali isu-isu kompleks secara mendalam dan mengidentifikasi makna-makna tersirat dari perspektif informan. Tujuannya adalah untuk memahami pola-pola yang berulang, hubungan antar konsep, dan implikasi yang muncul dari data wawancara dan dokumentasi. Analisis tematik memberikan kerangka kerja yang kuat untuk menginterpretasi data dan mencapai pemahaman yang komprehensif.

Proses analisis tematik diawali dengan transkripsi verbatim data wawancara untuk memastikan akurasi dan kelengkapan. Selanjutnya, dilakukan reduksi data dengan memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mengubah data kasar yang muncul dari transkrip. Tahap berikutnya adalah koding, di mana data dipecah menjadi unit-unit makna yang lebih kecil dan diberikan label konseptual. Kode-kode ini kemudian dikategorisasikan berdasarkan kesamaan dan hubungan logisnya, membentuk kelompok-kelompok yang lebih besar dan bermakna. Dari kategori-kategori yang telah terbentuk, peneliti kemudian mengidentifikasi tema-tema kunci yang merupakan inti dari fenomena yang diteliti. Tema-tema ini merepresentasikan aspek-aspek penting dari redefinisi komunikasi publik Indonesia di tengah hegemoni kecerdasan artifisial global. Analisis ini juga bertujuan untuk mengungkap implikasi spesifik terhadap praktik diplomasi

algoritmik dan strategi perlindungan kedaulatan kognitif (Dirgantara, 2025). Validitas hasil analisis didukung dengan triangulasi data dari berbagai sumber dan perspektif informan, untuk memastikan kekayaan dan kedalaman interpretasi..

HASIL DAN PEMBAHASAN

DAMPAK DIPLOMASI ALGORITMIK TERHADAP REDEFINISI KOMUNIKASI PUBLIK INDONESIA

Temuan penelitian menunjukkan bahwa diplomasi algoritmik telah membawa transformasi signifikan dalam praktik komunikasi publik di Indonesia. Implementasi kecerdasan artifisial dalam negosiasi multilateral dan analisis data strategis telah mengubah lanskap diplomatik secara fundamental (Judijanto et al., 2025). Algoritma kini berfungsi tidak hanya sebagai alat bantu analisis, melainkan sebagai aktor aktif dalam membentuk narasi dan memengaruhi persepsi publik terhadap kebijakan luar negeri (Thapar & Thapar, 2025).

Analisis mendalam mengungkapkan bahwa platform digital yang didukung AI secara inheren memengaruhi jangkauan dan dampak upaya diplomatik Indonesia (Sumrahadi & Maliki, 2024). Sifat algoritmik platform media sosial menciptakan kompleksitas baru dalam komunikasi publik, di mana informasi dapat dimanipulasi dan disebarluaskan dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya (Nurfajri et al., 2025). Fenomena ini menuntut pemahaman baru tentang bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan teknologi ini sekaligus menjaga otonomi informasinya.

Ketergantungan pada teknologi AI asing menimbulkan tantangan serius terhadap kedaulatan data dan regulasi nasional (Yokotani, A. Cery Kurnia, Wirazilmustaan, 2025). Studi komparatif menunjukkan bahwa negara-negara seperti Uni Eropa telah mengembangkan kerangka regulasi AI yang komprehensif melalui pendekatan risk-based regulation (Sajduk & Dziwisz, 2024). Sementara itu, konsep digital sovereignty menjadi semakin penting dalam diskursus kebijakan digital global (Pohle & Thiel, 2020).

TANTANGAN DAN PELUANG KEDAULATAN KOGNITIF INDONESIA

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa tantangan kritis terhadap kedaulatan kognitif Indonesia di tengah hegemoni AI global. Pertama, konsep kedaulatan kognitif sendiri masih dalam tahap evolusi dan memerlukan definisi yang lebih operasional dalam konteks Indonesia (Mydes & Tandane, 2025). Kedaulatan kognitif mencakup hak masyarakat untuk tidak hanya mengontrol data mereka, tetapi juga logika epistemik, kerangka interpretasi, dan penalaran algoritmik yang membentuk pemahaman mereka (Mydes & Tandane, 2025).

Kedua, dominasi platform digital global yang dikendalikan oleh perusahaan teknologi raksasa menciptakan bentuk kedaulatan virtual yang mengikis kemampuan negara untuk menjalankan kekuasaan infrastrukural (Kelton et al., 2022). Meskipun infrastruktur internet sebagian besar dikembangkan oleh korporasi Amerika Serikat, pengguna komersial semakin beroperasi di ruang global yang deteritorialisasi, menciptakan tantangan baru bagi kedaulatan nasional (Kelton et al., 2022).

Ketiga, perspektif dekolonial mengungkapkan bahwa AI berpotensi mereplikasi pola kolonial ekstraktif, menambang data dari Global South untuk melatih model yang dimiliki oleh Global North (Ahmed, 2025). Hal ini menuntut pendekatan dekolonial terhadap pengembangan AI yang mempertimbangkan kekuasaan dan nilai-nilai yang tertanam dalam sistem teknologi (Ahmed, 2025).

Di sisi lain, penelitian ini juga mengidentifikasi peluang strategis bagi Indonesia. Pertumbuhan teknologi Web3 dan konsep data cooperatives menawarkan model alternatif untuk pertukaran data yang aman, tepercaya, dan berdaulat (Bühler et al., 2023). Pendekatan ini dapat menjadi jalan bagi Indonesia untuk membangun kapasitas digitalnya secara mandiri sambil tetap terhubung dengan ekosistem global.

STRATEGI REDEFINISI KOMUNIKASI PUBLIK YANG ADAPTIF

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan beberapa strategi redefinisi komunikasi publik yang relevan bagi Indonesia. Pertama, pengembangan kerangka tata kelola AI yang adaptif dan berkelanjutan menjadi esensial (Birkstedt et al., 2023). Tata kelola AI harus mengintegrasikan prinsip-prinsip etika, transparansi, dan akuntabilitas sekaligus mempertimbangkan konteks sosial budaya Indonesia (Romadhona & Oktafenanda, 2025).

Kedua, peningkatan literasi digital masyarakat perlu dilakukan secara masif dan berkelanjutan. Kemampuan masyarakat untuk berpikir kritis dalam mengonsumsi informasi yang disajikan oleh algoritma menjadi kunci pertahanan kognitif. Studi menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap AI dipengaruhi oleh kesadaran, pengetahuan, dan respons emosional individu terhadap teknologi (Sartori & Bocca, 2023), (Brauner et al., 2025).

Ketiga, diplomasi teknologi baru perlu dikembangkan untuk memastikan bahwa manfaat AI dapat dirasakan secara merata oleh semua Negara (Feijóo et al., 2020). Untuk negara-negara berkembang yang masih bergumul dengan ketidaksetaraan, kekurangan pembangunan, dan eksklusivitas, diplomasi teknologi harus berfokus pada bagaimana teknologi dapat membantu kemanusiaan dan pembangunan berkelanjutan.

Keempat, penguatan regulasi nasional terkait perlindungan data pribadi dan kedaulatan informasi menjadi imperatif (Lisaldy et al., 2024). Kerangka regulasi harus mampu menyeimbangkan inovasi teknologi dengan perlindungan hak-hak digital warga negara, termasuk dalam konteks diplomasi digital dan komunikasi public (Marwan et al., 2022).

IMPLIKASI TEORETIS DAN ARAH PENELITIAN SELANJUTNYA

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis signifikan dalam memahami hubungan kompleks antara diplomasi algoritmik, kedaulatan kognitif, dan redefinisi komunikasi publik. Konsep kedaulatan kognitif yang diusulkan oleh Kakraba yang menawarkan kerangka analitis yang kaya untuk memahami dimensi epistemik dari kedaulatan di era AI (Kakraba et al., 2026), melampaui fokus tradisional pada kedaulatan data dan kedaulatan digital (Hummel et al., 2021).

Temuan penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya perspektif Global South dalam diskursus tata kelola AI global. Sebagian besar diskursus saat ini didominasi oleh perspektif negara-negara maju, sementara kebutuhan dan konteks negara berkembang seperti Indonesia seringkali terpinggirkan (Diky Dikrurahman, 2025). Penelitian lanjutan perlu mengembangkan kerangka analitis yang lebih inklusif dan kontekstual.

Secara khusus, penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi: (1) studi komparatif kebijakan tata kelola AI antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya; (2) analisis mendalam tentang dampak spesifik algoritma media sosial terhadap opini publik Indonesia; (3) pengembangan model literasi digital yang kontekstual untuk masyarakat Indonesia; serta (4) evaluasi efektivitas kebijakan perlindungan data dalam menjaga kedaulatan kognitif nasional.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa masa depan komunikasi publik Indonesia akan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk berinovasi dan beradaptasi dengan realitas teknologi yang terus berkembang pesat. Kolaborasi erat antara akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan menjadi esensial untuk merumuskan kebijakan yang responsif dan berkelanjutan terhadap tantangan diplomasi algoritmik (Sumrahadi & Maliki, 2024).

SIMPULAN

Penelitian ini secara komprehensif mengkaji dinamika diplomasi algoritmik dan implikasinya yang multidimensional terhadap kedaulatan kognitif, serta redefinisi fundamental komunikasi publik Indonesia, khususnya dalam konteks hegemoni kecerdasan artifisial global menjelang tahun 2026. Temuan kunci mengindikasikan bahwa adopsi dan integrasi teknologi

kecerdasan artifisial (AI) dalam praktik diplomasi telah menciptakan lanskap komunikasi yang jauh lebih kompleks dan transformatif dibandingkan era sebelumnya. Algoritma kini tidak hanya berfungsi sebagai medium transmisi informasi semata, melainkan juga secara aktif berperan dalam memoderasi, memfilter, dan bahkan membentuk persepsi serta preferensi publik terhadap narasi diplomatik. Fenomena ini secara langsung memengaruhi kedaulatan kognitif suatu negara, menjadikannya rentan terhadap manipulasi algoritmik, baik melalui penyebaran informasi bias, disinformasi, maupun polarisasi opini yang terotomatisasi. Oleh karena itu, Indonesia dihadapkan pada tuntutan krusial untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi adaptif yang tidak hanya defensif tetapi juga proaktif dalam menjaga integritas ruang kognitifnya di tengah arus dominasi teknologi global.

Redefinisi komunikasi publik Indonesia dalam era diplomasi algoritmik menuntut pemahaman ulang terhadap peran aktor negara, non-negara, dan bahkan entitas nonmanusia (AI) dalam membentuk opini publik dan mengarahkan kebijakan luar negeri. Hegemoni kecerdasan artifisial global menciptakan ketergantungan teknologi yang berpotensi mengikis kapasitas Indonesia untuk mengelola narasi dan representasinya di panggung internasional secara independen. Lebih lanjut, analisis menunjukkan bahwa kemampuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merespons pola manipulasi algoritmik akan menjadi indikator utama ketahanan kognitif nasional. Keberadaan platform digital yang dikendalikan algoritma asing juga menimbulkan tantangan serius terkait regulasi data, privasi, dan kepemilikan informasi, yang secara kolektif berpotensi mengancam otonomi budaya dan identitas bangsa. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa masa depan komunikasi publik Indonesia akan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk berinovasi dan beradaptasi dengan realitas teknologi yang terus berkembang pesat.

REKOMENDASI

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar pemerintah Indonesia segera mengembangkan kerangka regulasi yang komprehensif dan adaptif untuk tata kelola kecerdasan artifisial, khususnya dalam ranah diplomasi dan komunikasi publik. Kerangka ini harus mencakup aspek etika AI, transparansi algoritma, akuntabilitas pengembang dan pengguna, serta perlindungan data pribadi dan kedaulatan informasi nasional. Penting pula untuk secara masif meningkatkan literasi digital masyarakat di berbagai tingkatan, guna membekali publik dengan kemampuan berpikir kritis dalam mengonsumsi informasi yang disajikan oleh algoritma, mengenali pola

manipulasi, serta memverifikasi kebenaran konten digital. Program edukasi berkelanjutan dan inklusif harus dirancang untuk memperkuat daya tahan kognitif individu dan kolektif terhadap potensi bias atau disinformasi algoritmik.

Selain itu, kolaborasi erat antara akademisi, praktisi di bidang diplomasi dan komunikasi, serta pembuat kebijakan menjadi esensial untuk merumuskan kebijakan yang responsif dan berkelanjutan terhadap tantangan diplomasi algoritmik. Kemitraan ini dapat mencakup pembentukan pusat kajian antardisiplin, forum diskusi reguler, dan program riset bersama yang berfokus pada pengembangan solusi inovatif dalam memanfaatkan AI untuk kepentingan nasional, sembari memitigasi risiko yang melekat. Untuk penelitian lanjutan, disarankan agar fokus diarahkan pada studi kasus komparatif dengan negara-negara lain yang telah mengimplementasikan kebijakan serupa, serta analisis mendalam mengenai dampak spesifik algoritma pada sektor-sektor kunci komunikasi publik, termasuk studi longitudinal tentang perubahan perilaku audiens dan efektivitas strategi komunikasi pemerintah di era digital.

PUSTAKA

- Ahmed, S. A. (2025). *Algorithmic dependence and digital colonialism : a conceptual framework for artificial intelligence in education and knowledge systems of the Global South*. 1.
- Ausat, A. M. A. (2023). The role of social media in shaping public opinion and its influence on economic decisions. *Technology and Society Perspectives (TACIT)*.
- Ayu, I. G., Hadi, A., Nastiti, L., Ketut, N., Adnyani, S., Ananda, P. R., Made, N., Paramesthi, A., Ayu, I. G., Widiyani, M., & Kadek, N. (2025). *Law and Policy on AI Utilization for Good Governance in Indonesia*. 03010.
- Besman, A., & Evita, N. (2024). *AI in semi-automated journalism : a review of Indonesia ' s journalistic ethics*. 8(November), 583–594. <https://doi.org/10.25139/jsk.v8i3.7978>
- Brauner, P., Glawe, F., Liehner, G. L., Vervier, L., & Ziefle, M. (2025). Technological Forecasting & Social Change Mapping public perception of artificial intelligence : Expectations , risk – benefit tradeoffs , and value as determinants for societal acceptance. *Technological Forecasting & Social Change*, 220(June), 124304. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2025.124304>
- Bubashait, F. (n.d.). *The emerging role of AI technologies in supporting digital diplomacy and*

shaping international relations. 4, 25–48.

Bühler, M. M., Calzada, I., Cane, I., Jelinek, T., & Kapoor, A. (2023). *Unlocking the Power of Digital Commons : Data Cooperatives as a Pathway for Data Sovereign , Innovative and Equitable Digital Communities*. 146–171.

Diky Dikrurahman, A. (2025). Regulating Ai-Generated Content: A Comparative Study of Digital Rights And Algorithmic Accountability In Indonesia. *Advances In Social Humanities Research*, 3(12), 954–983. <https://doi.org/https://doi.org/10.46799/adv.v3i12.529>

Dirgantara, T. (2025). Generative artificial intelligence and national sovereignty: Indonesia's position in a fragmented digital economy. *Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development*.

Ekotrans, J. I., Fauzi, E., Citra, H., Marwenny, E., & Alfitrianti, N. (2024). *JIEE : Control of Personal Data and Cyber Space by Global Digital Platforms in Relation to Indonesia ' s Digital Sovereignty*. 04(01), 149–157.

Feijóo, C., Kwon, Y., Bauer, J. M., Bohlin, E., Howell, B., Jain, R., Potgieter, P. H., & Vu, K. (2020). Harnessing artificial intelligence (AI) to increase wellbeing for all: The case for a new technology diplomacy. *Telecommunications Policy*.

Hummel, P., Braun, M., Tretter, M., & Dabrock, P. (2021). Data sovereignty: A review. *Big Data & Society*.

Judijanto, L., Samaduri, L., & Nampira, A. A. (2025). AI in diplomacy: An analysis of the role of artificial intelligence in multilateral negotiations. *Synergisia*.

Juli, V. N., Supriyadi, T. A. A., Asih, B., Yudho, L., Suwarno, P., Nasional, F. K., & Ri, U. (2025). *JURNAL LOCUS : Penelitian & Pengabdian Pengembangan Model Deteksi Ancaman Maritim Berbasis AI : Kerangka Keamanan Prediktif untuk Penangkapan Ikan Ilegal dan Pembajakan di Laut Natuna*. 4(7), 4605–4622.

Kakraba, S., Agyemang, E. F., & Srivastav, S. K. (2026). Cognitive sovereignty and decolonial public health: Re-claiming epistemic authority in the global AI era. *Frontiers in Public Health*.

Kelton, M., Sullivan, M., Rogers, Z., Bienvenue, E., & Troath, S. (2022). Virtual sovereignty? Private internet capital, digital platforms and infrastructural power in the United States.

- Lisaldy, F., Ismail, I., & Iryani, D. (2024). Lex AI: Solution for governance of artificial intelligence in Indonesia. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 50–67.
- Maksimov, Kirill Georgievich Shapovalov, M. Y. (2025). *Искусственный интеллект в политической коммуникации: вызовы для обеспечения национальной безопасности*. 10(12), 77–83. <https://doi.org/10.24158/pep.2025.12.10>
- Marwan, A., Garduño, D. O.-C., & Bonfigli, F. (2022). Detection of digital law issues and implication for good governance policy in Indonesia. *BESTUUR*.
- Mirnes, Mujkić ; Avdić, S. (2026). *Digital Diplomacy as an Instrument of Shaping Global Policy : Communication Strategies , Algorithmic Influence and Disinformation Challenges Digitalna diplomatija kao instrument oblikovanja globalne politike : komunikacijske strategije , algoritamski utic*. 4(7), 33–40. <https://doi.org/10.59366/2831-1086.2026.4.7.35>
- Muhammad Jordan Baresi, Anak Agung Banyu Perwita, Y. H. (2025). U.S.-China Rivalry Controls AI-Based Defense Machine in the Natuna Sea and Malacca Strait: Indonesia's AI Governance Diplomacy in Navigating International Regulations. *Asian Journal of Science, Technology, Engineering, and Art*, 3(5), 1727–1745. <https://ejournal.yasin-alsys.org/AJSTE/article/view/7594/5673>
- Mydes, B., & Tandane, H. (2025). *ALGORITHMIC SOVEREIGNTY AND COGNITIVE COLONIZATION : AN UBUNTU FRAMEWORK FOR GEOPOLITICAL AI-MULTIPOLARITY*. 1, 1–332.
- Nugroho, F. (2024). *Artificial Intelligence Regulation and Political Ethics : An Analysis of Indonesia ' s Position in AI Governance*. 42–51.
- Nurfajri, I., Teguh, E., Pratama, H., Tupamahu, G. S., Saputra, R., & Erwina, Y. (2025). *Dampak Algoritma AI terhadap Komunikasi Publik : Memahami Manipulasi Informasi dan Realitas*. 1(3), 1–13.
- Nusi, M. I., Cokabo, D. M., & Susilo, T. (2025). *Supremasi Kognitif : Pelajaran dari Kepemimpinan Global untuk Doktrin Pertahanan Siber Indonesia*. 06(11), 4961–4977.
- Nuswantari, S. A., Maret, S., District, J., City, S., & Java, C. (2025). *Artificial Intelligence-Driven*

- Peña, N. De, Ramón, I., Benavidez, R., Fernando, H., & Sierra, G. (2025). *Algocracy in the Global South : The threat of a new dependency*. 14, 1–26. <https://doi.org/10.5354/0719-2584.2025.74784>
- Pohle, J., & Thiel, T. (2020). Digital sovereignty. *Internet Policy Review*.
- Prakoso, L. Y., Risahdi, M., & Selamet, M. S. (2025). *Artificial Intelligence Untuk Resilensi Keamanan Maritim*. 3(8), 835–846.
- Prastyanti, R. A., & Sharma, R. (2024). Establishing consumer trust through data protection law as a competitive advantage in Indonesia and India. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 4(2), 354–390.
- Purwaningtyas, M. P. F. (2020). Ketidakpercayaan dan Eskapisme Kaum Muda Menghadapi Paparan Informasi Covid-19. *ETTISAL: Journal of*
<https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ettisal/article/view/5068>
- Romadhona, M. K., & Oktafenanda, R. D. (2025). Ethics and governance of AI in healthcare: Case Indonesia, EU, and the US. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 17(2), 201–223.
- Sajduk, B., & Dziwisz, D. (2024). *Comparative Analysis of AI Development Strategies : A Study of China ' s Ambitions and the EU ' s Regulatory Framework*. September.
- Sartori, L., & Bocca, G. (2023). Minding the gap (s): public perceptions of AI and socio - technical imaginaries. *AI & SOCIETY*, 38(2), 443–458. <https://doi.org/10.1007/s00146-022-01422-1>
- Silitonga, F., & Isbah, M. F. (2023). Artificial intelligence and the future of work in the Indonesian public sector. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*.
- Sumrahadi, A., & Maliki, M. (2024). *Navigating the Data Stream : The Intersection of Digital Politics and Indonesian Foreign Policy in the Era of Big Data*. 5(1), 1–16.
- Wadipalapa, R. P., Katharina, R., Nainggolan, P. P., Aminah, S., Apriani, T., Ma'rifah, D., & Anisah, A. L. (2024). An ambitious artificial intelligence policy in a decentralised governance system: Evidence from Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*.
- Yokotani, A. Cery Kurnia, Wirazilmustaan, R. D. S. (2025). PENGENDALIAN DATA PRIBADI

DAN RUANG SIBER OLEH PLATFORM DIGITAL BIG DATAGLOBAL TERKAIT
KEDAULATAN DIGITAL INDONESIA. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 19(1), 70–80.
<https://doi.org/https://journal.ubb.ac.id/index.php/progresif/article/view/7017>

Zeynalova, S. (2026). AI, BIG DATA AND THE EVOLUTION OF DIGITAL DIPLOMACY: A
TRANSFORMATIVE SHIFT IN 21ST CENTURY FOREIGN POLICY PRACTICE. *Journal*
Veredas Do Direito, 23. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18623/rvd.v23.5338>

Кубанцева, Е. В. (2026). *Искусственный интеллект как ресурс цифрового неокOLONиализма и
его влияние на цифровой суверенитет*. 26, 101–109.